

PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah

Available online <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/ph>



SEJARAH ISTANA KOTA BAHRAN LABUHANBATU SELATAN

Astri Yudianingsih

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan,
Medan, Indonesia.

astriyudianingsih70@gmail.com

Accepted: 17 Juli 2026

Published: 21 Juli 2026

ABSTRACT

Istana Kota Bahrhan merupakan peninggalan bersejarah Kesultanan Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang memiliki nilai penting dalam perkembangan politik, sosial, dan budaya masyarakat Melayu. Namun, kajian mengenai sejarah berdirinya, fungsi, serta transformasi peran istana akibat kolonialisme Belanda masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejarah berdirinya Istana Kota Bahrhan, faktor-faktor yang melatarbelakangi pembangunannya, fungsi istana dalam sistem pemerintahan Kesultanan Kota Pinang, pengaruh kolonial Belanda terhadap perubahan struktur pemerintahan, serta upaya pelestariannya sebagai warisan budaya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara dengan tokoh masyarakat serta pihak yang memahami sejarah Kesultanan Kota Pinang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Istana Kota Bahrhan dibangun sekitar tahun 1934 pada masa pemerintahan Sultan Tengku Mustafa sebagai pusat pemerintahan dan simbol legitimasi Kesultanan Kota Pinang di tengah perubahan politik pada masa kolonial. Selain berfungsi sebagai pusat administrasi, istana juga menjadi pusat hukum adat, diplomasi, kegiatan ekonomi, kebudayaan, dan keagamaan. Intervensi pemerintah kolonial melalui kontrak politik, *Korte Verklaring*, pembentukan *afdeling*, dan pengawasan *controleur* mengubah struktur birokrasi kesultanan serta menggeser fungsi politik istana. Meskipun demikian, Istana Kota Bahrhan tetap memiliki nilai historis dan budaya yang penting sehingga pelestariannya melalui konservasi, perlindungan cagar budaya, serta pengembangan wisata sejarah menjadi langkah strategis dalam menjaga identitas sejarah masyarakat Labuhanbatu Selatan.

Keywords: Istana, sejarah lokal, Bahrhan, cagar budaya.

How to Cite: Yudianingsih, A. (2026) Sejarah Istana Kota Bahrhan Labuhanbatu Selatan. Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (132-142)

*Corresponding author:
astriyudianingsih70@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Warisan budaya merupakan jejak peradaban yang merepresentasikan perjalanan sejarah suatu masyarakat sekaligus menjadi identitas yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman budaya dan sejarah menyimpan banyak peninggalan bersejarah berupa situs, bangunan, maupun kawasan cagar budaya yang memiliki nilai penting bagi ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Namun, berbagai peninggalan tersebut menghadapi tantangan berupa kurangnya perhatian terhadap pelestarian, kerusakan akibat faktor alam, maupun aktivitas manusia yang mengancam keberlangsungannya (Kiswinarso & Hanif, 2016). Oleh karena itu, penelitian terhadap bangunan bersejarah tidak hanya bertujuan merekonstruksi masa lalu, tetapi juga menjadi dasar bagi upaya pelestarian warisan budaya.

Salah satu peninggalan sejarah yang memiliki nilai historis tinggi di Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Istana Kota Bahrn, yang merupakan bekas pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang. Kesultanan Kota Pinang, yang pada awalnya dikenal sebagai Kerajaan Pinang Awan, diperkirakan berdiri sejak abad ke-16 dan berkembang menjadi salah satu kerajaan Melayu penting di kawasan Sumatera Timur. Letak wilayahnya yang berada di sekitar Sungai Barumun menjadikan Kesultanan Kota Pinang berkembang sebagai pusat perdagangan sekaligus penghubung jalur ekonomi menuju Selat Malaka yang pada masa itu merupakan salah satu jalur perdagangan internasional paling strategis (Reid, 2011).

Meskipun demikian, kejayaan Kesultanan Kota Pinang tidak terlepas dari pengaruh kolonialisme Belanda. Campur tangan kolonial mengubah struktur sosial masyarakat dan memperkuat ketimpangan antara golongan bangsawan dan rakyat, yang pada akhirnya memicu berbagai konflik sosial menjelang masa kemerdekaan Indonesia. Pada peristiwa tersebut, Istana Kota Bahrn mengalami penjarahan dan penghancuran

sehingga hanya menyisakan sebagian bangunan yang masih bertahan hingga saat ini (Reid, 2011). Kondisi fisik istana yang semakin memprihatinkan menunjukkan masih rendahnya perhatian terhadap pelestarian warisan sejarah lokal, padahal bangunan tersebut memiliki nilai penting sebagai sumber pembelajaran sejarah, identitas budaya masyarakat Melayu, serta aset wisata sejarah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian mengenai sejarah Istana Kota Bahrn menjadi penting untuk merekonstruksi perkembangan Kesultanan Kota Pinang, memahami fungsi istana dalam kehidupan politik, sosial, dan ekonomi masyarakat Melayu, serta mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan kemundurannya. Selain memperkaya historiografi sejarah lokal Sumatera Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi upaya pelestarian cagar budaya dan pengembangan sejarah lokal sebagai bagian dari identitas budaya nasional.

Kajian mengenai sejarah Istana Kota Bahrn tidak dapat dilepaskan dari perspektif historiografi sejarah lokal. Sejarah lokal merupakan kajian sejarah yang berfokus pada perkembangan suatu wilayah tertentu dengan memperhatikan dinamika politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Menurut Kuntowijoyo (2013), sejarah lokal memiliki kedudukan penting dalam memperkaya historiografi nasional karena mampu mengungkap berbagai fakta sejarah yang sering kali tidak tercatat dalam narasi sejarah nasional.

Kesultanan Kota Pinang merupakan bagian dari tradisi kerajaan Melayu yang berkembang di kawasan pesisir timur Sumatra. Kerajaan Melayu tidak hanya dipahami sebagai institusi politik, melainkan juga sebagai pusat perkembangan agama, adat istiadat, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Melayu. Dalam sistem pemerintahan Melayu, sultan bukan hanya berfungsi sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai pelindung adat dan agama. Oleh sebab itu, keberadaan istana menjadi simbol utama kekuasaan kerajaan sekaligus pusat aktivitas administrasi, peradilan,

diplomasi, dan kebudayaan. Konsep ini penting digunakan untuk menjelaskan kedudukan Istana Kota Bahrn sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang sebelum berakhirnya sistem kerajaan akibat Revolusi Sosial tahun 1946.

Penelitian ini menggunakan teori kekuasaan tradisional dari Max Weber tahun 1978. Weber mengemukakan bahwa legitimasi kekuasaan tradisional berasal dari kepercayaan masyarakat terhadap adat istiadat, keturunan, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun (Effendi Chairi:2019). Dalam sistem ini, seorang penguasa memperoleh kewibawaannya bukan melalui pemilihan umum ataupun kekuatan militer semata, melainkan melalui pengakuan masyarakat terhadap tradisi yang telah berlangsung lama. Teori Weber sangat relevan dalam menganalisis Kesultanan Kota Pinang karena kedudukan sultan ditentukan oleh garis keturunan kerajaan dan memperoleh legitimasi melalui adat Melayu serta nilai-nilai Islam. Dengan demikian, keberadaan Istana Kota Bahrn bukan sekadar bangunan fisik, melainkan representasi legitimasi politik sultan. Melalui teori ini dapat dipahami bagaimana otoritas Kesultanan Kota Pinang terbentuk, dipertahankan, kemudian mengalami perubahan ketika pemerintah kolonial Belanda mulai melakukan intervensi terhadap struktur pemerintahan tradisional.

Dalam perspektif antropologi politik, istana merupakan simbol material dari kekuasaan negara. Kekuasaan kerajaan tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mempertontonkan legitimasi politik melalui simbol, ritual, arsitektur, dan upacara kerajaan. Dengan kata lain, bangunan istana merupakan representasi visual dari kewibawaan penguasa. Konsep tersebut sesuai dengan fungsi Istana Kota Bahrn sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang. Selain menjadi tempat tinggal sultan, istana juga berfungsi sebagai pusat pengambilan keputusan politik, pelaksanaan upacara adat, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, hingga pusat hubungan

diplomatik dengan kerajaan lain maupun pemerintah kolonial. Oleh karena itu, penelitian terhadap sejarah Istana Kota Bahrn tidak hanya berorientasi pada aspek arsitektural, tetapi juga pada makna simbolik yang terkandung di dalamnya sebagai pusat identitas budaya Melayu.

Perkembangan Kesultanan Kota Pinang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan kolonial Belanda di Sumatera Timur. Kebijakan seperti *Korte Verklaring*, *Lange Verklaring*, pembentukan *afdeling*, serta pengangkatan *controleur* menyebabkan berkurangnya otonomi politik kerajaan. Intervensi kolonial di Sumatera Timur secara perlahan menggeser fungsi kerajaan dari pusat kekuasaan independen menjadi mitra administratif pemerintah Hindia Belanda. Dalam konteks Kesultanan Kota Pinang, perubahan tersebut menyebabkan sultan tidak lagi memiliki kewenangan penuh atas wilayahnya, sementara istana bertransformasi menjadi simbol pemerintahan yang berada di bawah pengawasan kolonial.

Berakhirnya kekuasaan Kesultanan Kota Pinang berkaitan erat dengan Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946. Dampak revolusi tidak hanya mengakhiri sistem monarki tradisional, tetapi juga menghancurkan simbol-simbol kekuasaan kerajaan, termasuk istana. Oleh karena itu, teori revolusi sosial digunakan untuk menjelaskan hubungan antara perubahan politik nasional dengan keruntuhan Kesultanan Kota Pinang serta kerusakan fisik Istana Kota Bahrn sebagai salah satu peninggalan sejarah kerajaan Melayu.

Sebagai salah satu peninggalan sejarah Kesultanan Kota Pinang, Istana Kota Bahrn memiliki nilai penting sebagai warisan budaya yang perlu dilestarikan. Menurut UNESCO, pelestarian warisan budaya bertujuan menjaga nilai sejarah, ilmu pengetahuan, identitas budaya, dan keberlanjutan suatu bangsa. Di Indonesia, pelestarian tersebut diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang memiliki nilai

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga wajib dilindungi, dikembangkan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan demikian, kajian terhadap sejarah Istana Kota Bahrān tidak hanya bertujuan merekonstruksi masa lalu, tetapi juga memberikan dasar akademik bagi upaya pelestarian dan pemanfaatannya sebagai sumber pembelajaran sejarah lokal.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode penelitian sejarah (*historical research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam latar belakang berdirinya Istana Kota Bahrān, perkembangan fungsinya dalam sistem pemerintahan Kesultanan Kota Pinang, pengaruh kolonialisme Belanda terhadap keberadaan istana, dampak Revolusi Sosial Sumatera Timur Tahun 1946, serta kondisi pelestariannya pada masa kini.

Pada tahap ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber tertulis berupa buku, artikel jurnal ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, arsip, dokumen pemerintah, laporan penelitian, surat kabar, foto-foto lama, serta dokumen lain yang berkaitan dengan sejarah Kesultanan Kota Pinang, Istana Kota Bahrān, kolonialisme Belanda di Sumatera Timur, dan Revolusi Sosial Tahun 1946.

Untuk meningkatkan keabsahan data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan hasil wawancara serta dokumen sejarah lainnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran sejarah Istana Kota Bahrān secara utuh serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi lokal dan upaya pelestarian warisan budaya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

RESULT AND DISCUSSION

1. Sejarah Kesultanan Pinang

Menurut tradisi lisan (*teromba*) Kesultanan Kota Pinang yang kemudian didokumentasikan oleh Tengku Luckman Sinar, cikal bakal Kesultanan Kota Pinang bermula dari berdirinya Kerajaan Pinang Awan. Kerajaan ini didirikan oleh “Batara Sinomba” atau “Batara Gurga Pinayungan Tuanku Raja Nan Sakti” yang diyakini berasal dari garis keturunan Kerajaan Pagaruyung. Dalam perjalanan menuju pesisir timur Sumatra, Batara Sinomba bersama rombongannya tiba di kawasan Hutan Mumuk atau Pinang Awan yang saat itu dihuni oleh masyarakat dari marga Dasopang dan Tambak. Melalui kemampuan kepemimpinannya, Batara Sinomba berhasil mendamaikan konflik antarkelompok masyarakat setempat sehingga kemudian diangkat sebagai pemimpin wilayah tersebut. Peristiwa ini menjadi titik awal terbentuknya Kerajaan Pinang Awan yang selanjutnya berkembang menjadi Kesultanan Kota Pinang.

Dari sudut pandang historiografi, kisah migrasi Batara Sinomba dari Pagaruyung menunjukkan adanya hubungan historis antara kerajaan-kerajaan Minangkabau dengan pembentukan kerajaan-kerajaan Melayu di pesisir timur Sumatra. Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya menjelaskan bahwa sejak abad ke-15 hingga abad ke-17 kawasan pesisir timur Sumatra berkembang sebagai wilayah pertemuan berbagai kekuatan politik dan ekonomi yang menghubungkan pedalaman Minangkabau, wilayah Batak, serta jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Mobilitas elite politik dari pedalaman menuju pesisir merupakan salah satu faktor yang mendorong lahirnya kerajaan-kerajaan Melayu baru yang kemudian memainkan peran penting dalam perdagangan regional dan penyebaran Islam.

Sebagai kerajaan Melayu, Kesultanan Kota Pinang memiliki struktur pemerintahan yang mengikuti pola pemerintahan kesultanan di Sumatra Timur. Sultan berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang

menjalankan fungsi politik, pemerintahan, peradilan, serta pelindung adat dan agama Islam (Riskita Amalia Masri Nst:2024). Dalam menjalankan pemerintahan, sultan dibantu oleh para pembesar kerajaan yang terdiri atas keluarga bangsawan, pembesar adat, penghulu, dan perangkat pemerintahan lainnya yang memiliki tugas mengatur administrasi wilayah, penyelesaian sengketa, pemungutan upeti, serta menjaga keamanan kerajaan. Struktur pemerintahan seperti ini menunjukkan bahwa kerajaan Melayu tidak hanya bertumpu pada kekuasaan individu sultan, tetapi juga pada hubungan timbal balik antara elite kerajaan, pemuka adat, dan masyarakat sebagai sumber legitimasi politik.

Selain memiliki struktur pemerintahan yang mapan, Kesultanan Kota Pinang juga membangun hubungan politik dengan berbagai kerajaan di Sumatra Timur. Berdasarkan silsilah kerajaan dan berbagai catatan sejarah, hubungan tersebut terjalin dengan Kesultanan Asahan, Kesultanan Bilah, Kesultanan Panai, dan Kesultanan Kualuh yang memiliki keterkaitan genealogis maupun politik. Bahkan, melalui perkawinan politik antara keturunan Batara Sinomba dengan lingkungan Kesultanan Aceh Darussalam, jaringan kekuasaan Kesultanan Kota Pinang semakin meluas dan memperkuat posisinya di kawasan timur Sumatra. Hubungan antarkerajaan tersebut tidak hanya bertujuan mempertahankan stabilitas politik, tetapi juga memperkuat jaringan perdagangan dan penyebaran pengaruh Islam di sepanjang aliran Sungai Barumun hingga pesisir Selat Malaka.

Dalam analisis sejarah regional, Anthony Reid menjelaskan bahwa kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatra Timur berkembang karena kemampuannya menguasai jalur perdagangan sungai yang menghubungkan daerah pedalaman penghasil komoditas dengan pelabuhan-pelabuhan di pesisir timur Sumatra. Sungai Barumun menjadi urat nadi ekonomi Kesultanan Kota Pinang karena berfungsi sebagai jalur distribusi hasil hutan, pertanian, dan

perdagangan menuju Selat Malaka. Posisi geografis tersebut menyebabkan Kesultanan Kota Pinang berkembang tidak hanya sebagai pusat pemerintahan, tetapi juga sebagai pusat ekonomi dan kebudayaan masyarakat Melayu di wilayah Labuhanbatu bagian selatan.

Perkembangan politik dan ekonomi Kesultanan Kota Pinang pada akhirnya melahirkan kebutuhan akan sebuah pusat pemerintahan yang mampu merepresentasikan kewibawaan kerajaan. Kondisi inilah yang kemudian melatarbelakangi pembangunan Istana Kota Bahrn pada masa pemerintahan Sultan Tengku Mustafa atau Tengku Makmur Perkasa Alamsyah pada dekade 1930-an. Dengan demikian, keberadaan Istana Kota Bahrn tidak dapat dipahami sebagai bangunan yang berdiri secara terpisah, melainkan sebagai hasil dari proses sejarah panjang yang berakar pada perkembangan Kerajaan Pinang Awan, transformasi Kesultanan Kota Pinang, serta dinamika politik kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatra Timur.

2. Sejarah Berdirinya Istana Kota Bahrn

Pembangunan Istana Kota Bahrn merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan Kesultanan Kota Pinang pada paruh pertama abad ke-20. Keberadaan istana tidak hanya menandai berdirinya sebuah bangunan pemerintahan baru, tetapi juga mencerminkan perubahan politik, ekonomi, dan budaya yang dialami Kesultanan Kota Pinang pada masa kolonial Belanda. Berdasarkan berbagai sumber sejarah lokal, Istana Kota Bahrn mulai dibangun sekitar tahun 1934 pada masa pemerintahan Sultan Tengku Mustafa yang bergelar Sultan Tengku Makmur Perkasa Alamsyah. Pemindahan pusat pemerintahan ke kompleks istana baru merupakan respons terhadap perkembangan administrasi kerajaan serta kebutuhan akan pusat pemerintahan yang lebih representatif sesuai dengan dinamika politik pada masa itu.

Dari aspek politik, pembangunan Istana Kota Bahrn berlangsung ketika hubungan antara kerajaan-kerajaan Melayu di Sumatra

Timur dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda telah mengalami perubahan yang signifikan. Sejak diterapkannya berbagai kontrak politik (*politiek contract*) dan *Korte Verklaring* pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, kedudukan kerajaan-kerajaan Melayu secara bertahap mengalami transformasi dari entitas politik yang relatif mandiri menjadi kerajaan yang berada di bawah pengawasan pemerintah kolonial. Walaupun kewenangan politik para sultan mengalami pembatasan, pemerintah kolonial tetap mempertahankan keberadaan institusi kesultanan sebagai bagian dari sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dalam sistem tersebut, sultan tetap menjalankan fungsi administratif di wilayahnya, tetapi berbagai kebijakan strategis harus diselaraskan dengan kepentingan pemerintah kolonial. Kondisi inilah yang menjadi salah satu latar belakang pembangunan Istana Kota Bahrn sebagai pusat administrasi pemerintahan Kesultanan Kota Pinang yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan pada masa kolonial.

Selain faktor politik, pembangunan Istana Kota Bahrn juga didukung oleh kondisi ekonomi Kesultanan Kota Pinang yang relatif berkembang pada awal abad ke-20. Letaknya yang berada di sekitar aliran Sungai Barumon memberikan keuntungan strategis karena sungai tersebut menjadi jalur transportasi utama yang menghubungkan daerah pedalaman dengan kawasan pesisir timur Sumatra. Melalui jalur ini berbagai komoditas, seperti hasil pertanian, hasil hutan, rotan, damar, karet, dan produk perkebunan lainnya diperdagangkan ke berbagai wilayah di Sumatra Timur bahkan hingga Selat Malaka. Menurut Anthony Reid, sungai-sungai di Sumatra Timur pada masa kolonial memiliki fungsi yang sangat penting sebagai urat nadi perdagangan regional sehingga kerajaan yang mampu menguasai jalur sungai umumnya berkembang menjadi pusat ekonomi sekaligus pusat kekuasaan. Dengan demikian, pembangunan Istana Kota Bahrn juga merefleksikan kemampuan ekonomi

Kesultanan Kota Pinang dalam mempertahankan eksistensinya di tengah perubahan struktur ekonomi kolonial.

Dari sisi arsitektur, Istana Kota Bahrn memperlihatkan karakter bangunan istana Melayu yang berkembang pada awal abad ke-20 dengan memadukan unsur arsitektur tradisional Melayu dan pengaruh arsitektur kolonial. Penggunaan panggung yang relatif tinggi, bentuk atap limas, bukaan jendela yang lebar, serta ornamen-ornamen khas Melayu menunjukkan adanya adaptasi terhadap kondisi iklim tropis sekaligus mempertahankan identitas budaya lokal. Pada saat yang sama, tata ruang yang lebih teratur, penggunaan material bangunan yang lebih modern, serta penataan ruang administrasi memperlihatkan adanya pengaruh konsep arsitektur kolonial yang berkembang pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Perpaduan tersebut menunjukkan bahwa Istana Kota Bahrn merupakan representasi proses akulturasi antara tradisi lokal dan modernisasi administrasi kolonial tanpa menghilangkan identitas kemelayuan yang menjadi dasar legitimasi kesultanan.

Lebih jauh, pembangunan Istana Kota Bahrn tidak dapat dipahami hanya sebagai pembangunan fisik semata. Dalam perspektif antropologi politik, bangunan istana merupakan simbol yang mewakili keberadaan negara dan legitimasi kekuasaan. Clifford Geertz melalui konsep *Negara Teater* (*Theatre State*) menjelaskan bahwa istana merupakan pusat simbolik yang memperlihatkan kewibawaan penguasa melalui tata ruang, arsitektur, upacara adat, serta berbagai aktivitas pemerintahan. Kekuasaan raja tidak hanya dijalankan melalui kebijakan administratif, tetapi juga dipertunjukkan melalui simbol-simbol budaya yang menciptakan pengakuan masyarakat terhadap legitimasi penguasa.

Konsep tersebut relevan dengan keberadaan Istana Kota Bahrn sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang. Istana berfungsi sebagai kediaman resmi sultan, tempat penyelenggaraan musyawarah

kerajaan, pelaksanaan peradilan adat, penerimaan tamu kerajaan, penyelenggaraan upacara keagamaan, serta pusat berbagai aktivitas sosial budaya masyarakat Melayu. Dengan demikian, Istana Kota Bahrn menjadi ruang tempat kekuasaan politik, adat, agama, dan budaya dipertemukan dalam satu institusi yang memperkuat legitimasi Kesultanan Kota Pinang di hadapan masyarakat maupun pemerintah kolonial.

Apabila dianalisis secara historis, pembangunan Istana Kota Bahrn pada tahun 1934 juga menunjukkan upaya Kesultanan Kota Pinang untuk mempertahankan identitas politiknya di tengah semakin kuatnya intervensi pemerintah Hindia Belanda. Di satu sisi, kesultanan harus menyesuaikan diri dengan sistem administrasi kolonial yang membatasi kewenangan politik sultan. Di sisi lain, pembangunan istana menjadi bentuk afirmasi bahwa Kesultanan Kota Pinang tetap memiliki otoritas budaya, simbolik, dan sosial sebagai pemimpin masyarakat Melayu. Oleh karena itu, Istana Kota Bahrn bukan hanya peninggalan arsitektur, melainkan representasi dari strategi adaptasi kerajaan Melayu dalam menghadapi perubahan politik kolonial sekaligus simbol keberlanjutan identitas Kesultanan Kota Pinang hingga menjelang berakhirnya sistem kerajaan akibat Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946.

Keberadaan Istana Kota Bahrn memiliki arti yang jauh lebih luas daripada sekadar kediaman resmi Sultan Kesultanan Kota Pinang. Dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu, istana merupakan pusat aktivitas politik, administrasi, ekonomi, sosial, keagamaan, dan kebudayaan yang menjadi penggerak utama kehidupan kerajaan. Oleh karena itu, memahami sejarah Istana Kota Bahrn tidak cukup hanya dengan menelusuri proses pembangunannya, tetapi juga harus mengkaji berbagai fungsi yang dijalankannya selama menjadi pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang.

Fungsi utama Istana Kota Bahrn adalah sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Kota Pinang. Seluruh aktivitas administrasi

kerajaan dijalankan dari lingkungan istana, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan, penyusunan kebijakan, pengaturan wilayah kekuasaan, hingga koordinasi dengan para pembesar kerajaan. Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memimpin jalannya pemerintahan dari istana dengan dibantu oleh para pembesar kerajaan, penghulu, bendahara, serta pejabat adat yang memiliki tugas masing-masing dalam mengelola kehidupan kerajaan. Keberadaan istana sebagai pusat pemerintahan menunjukkan bahwa bangunan tersebut merupakan representasi dari eksistensi negara dalam bentuk kerajaan. Dalam konteks Kesultanan Kota Pinang, legitimasi tersebut diwujudkan melalui keberadaan istana sebagai tempat sultan menjalankan fungsi pemerintahan sekaligus memperlihatkan kewibawaannya kepada masyarakat.

Selain menjalankan fungsi pemerintahan, Istana Kota Bahrn juga menjadi pusat pelaksanaan hukum adat Melayu. Berbagai persoalan yang menyangkut sengketa tanah, pewarisan, perkawinan, pelanggaran adat, hingga konflik antarmasyarakat diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh sultan bersama para penghulu dan tokoh adat. Dalam tradisi pemerintahan Melayu, hukum adat dan hukum Islam tidak diposisikan sebagai dua sistem yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi dalam menciptakan ketertiban sosial.

Istana Kota Bahrn juga menjalankan fungsi sebagai pusat hubungan diplomatik Kesultanan Kota Pinang dengan kerajaan-kerajaan lain maupun pemerintah kolonial Hindia Belanda. Berbagai perundingan politik, penerimaan tamu kerajaan, pembahasan kerja sama antarkerajaan, serta komunikasi dengan pejabat kolonial dilaksanakan di lingkungan istana. Hubungan diplomatik tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah Hindia Belanda menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (*indirect rule*). Dalam kondisi tersebut, istana berfungsi sebagai ruang negosiasi antara kepentingan Kesultanan Kota

Pinang dengan kebijakan pemerintah kolonial. Sultan tidak hanya berperan sebagai pemimpin masyarakat Melayu, tetapi juga sebagai mediator politik yang menjaga stabilitas wilayah di tengah meningkatnya intervensi kolonial.

Sebagai pusat pemerintahan, istana menjadi tempat pengaturan berbagai aktivitas ekonomi kerajaan, termasuk pengelolaan upeti, pengawasan perdagangan, serta pengaturan hubungan ekonomi dengan para pedagang yang datang dari berbagai daerah. Dengan demikian, fungsi ekonomi istana tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kerajaan, tetapi juga mencerminkan kemampuan Kesultanan Kota Pinang dalam mengendalikan aktivitas perdagangan regional.

Istana Kota Bahrn merupakan pusat perkembangan kebudayaan Melayu di wilayah Kota Pinang. Berbagai upacara adat, pelantikan pejabat kerajaan, perayaan hari-hari besar Islam, pertunjukan kesenian, pembacaan syair, serta kegiatan sastra Melayu diselenggarakan di lingkungan istana. Melalui aktivitas tersebut, istana berfungsi sebagai ruang pelestarian nilai-nilai budaya sekaligus media pewarisan identitas Melayu kepada masyarakat.

Sebagai kerajaan yang berlandaskan tradisi Islam, Kesultanan Kota Pinang menempatkan istana sebagai salah satu pusat kegiatan keagamaan. Sultan memiliki kedudukan bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai pelindung agama Islam di wilayah kekuasaannya. Berbagai kegiatan keagamaan seperti peringatan hari besar Islam, pembacaan doa kerajaan, musyawarah ulama, serta pembinaan kehidupan keagamaan masyarakat memperoleh dukungan langsung dari lingkungan istana.

Kedekatan antara kekuasaan politik dan agama memperlihatkan bahwa legitimasi sultan tidak hanya dibangun melalui garis keturunan, tetapi juga melalui perannya sebagai penjaga nilai-nilai keislaman yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Melayu.

Oleh karena itu, fungsi keagamaan menjadi salah satu unsur penting yang memperkuat posisi Istana Kota Bahrn sebagai pusat kehidupan Kesultanan Kota Pinang.

Berdasarkan berbagai fungsi tersebut, Istana Kota Bahrn dapat dipahami sebagai institusi multidimensional yang mengintegrasikan kekuasaan politik, hukum adat, ekonomi, diplomasi, kebudayaan, dan agama dalam satu ruang pemerintahan. Keberadaan istana mencerminkan bagaimana Kesultanan Kota Pinang membangun sistem pemerintahan yang tidak hanya bertumpu pada kekuatan politik, tetapi juga pada legitimasi budaya dan religius yang hidup di tengah masyarakat Melayu.

Dengan demikian, nilai historis Istana Kota Bahrn tidak hanya terletak pada usia bangunannya, tetapi juga pada perannya sebagai pusat kehidupan Kesultanan Kota Pinang yang membentuk identitas politik dan budaya masyarakat Labuhanbatu Selatan hingga berakhirnya sistem kesultanan akibat Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946.

Sejak pertengahan abad ke-19 wilayah Sumatra Timur menjadi salah satu kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena berkembangnya industri perkebunan ekspor. Kepentingan ekonomi tersebut mendorong pemerintah kolonial memperluas pengaruh politiknya terhadap kerajaan-kerajaan Melayu di pesisir timur Sumatra. Berbeda dengan daerah yang dikuasai melalui penaklukan militer secara langsung, di Sumatra Timur pemerintah Hindia Belanda lebih memilih mempertahankan struktur kerajaan lokal sebagai bagian dari sistem pemerintahan kolonial tidak langsung (*indirect rule*). Melalui kebijakan ini, para sultan tetap dipertahankan sebagai penguasa tradisional, tetapi kewenangan politiknya dibatasi melalui berbagai instrumen administratif dan hukum kolonial. Setelah diberlakukannya *Korte Verklaring*, hubungan antara Kesultanan Kota Pinang dengan pemerintah kolonial berubah secara mendasar. Kesultanan tidak lagi dipandang sebagai mitra politik yang memiliki kedudukan setara, melainkan sebagai bagian

dari struktur administrasi Hindia Belanda. Sultan tetap menjalankan pemerintahan sehari-hari, namun berbagai keputusan strategis, termasuk urusan keamanan, hubungan antardaerah, dan kebijakan politik, harus memperoleh persetujuan pemerintah kolonial. Dengan demikian, penerapan *Korte Verklaring* menjadi instrumen yang secara efektif mengurangi kedaulatan politik Kesultanan Kota Pinang.

Pembentukan *afdeling* merupakan bagian dari modernisasi administrasi kolonial yang bertujuan memperkuat pengawasan terhadap wilayah-wilayah kerajaan di Sumatra Timur. Melalui sistem tersebut, Kesultanan Kota Pinang tidak lagi berdiri sebagai satuan politik yang sepenuhnya mandiri, tetapi ditempatkan dalam hierarki pemerintahan kolonial bersama kerajaan-kerajaan lainnya. Struktur administrasi baru ini mempersempit ruang gerak pemerintahan kesultanan karena sebagian besar urusan administratif berada di bawah koordinasi pejabat colonial. Intervensi pemerintah kolonial membawa perubahan mendasar terhadap fungsi Istana Kota Bahrn. Jika pada masa sebelum kolonial istana menjadi pusat pengambilan keputusan politik yang bersifat independen, pada masa pemerintahan Hindia Belanda fungsi tersebut mengalami pergeseran menjadi pusat administrasi lokal yang berada di bawah pengawasan pejabat kolonial. Sultan masih menjalankan berbagai aktivitas pemerintahan dari lingkungan istana, tetapi kewenangannya telah dibatasi oleh kontrak politik dan sistem birokrasi kolonial. Akibatnya, istana tidak lagi menjadi simbol kedaulatan politik yang utuh, melainkan lebih berfungsi sebagai simbol legitimasi adat, budaya Melayu, dan otoritas keagamaan di tengah dominasi pemerintahan colonial (Harahap:2005).

3. Pelestarian Istana Kota Bahrn sebagai Warisan Budaya dan Identitas Sejarah Lokal

Keberadaan Istana Kota Bahrn menjadi bukti material yang merekam dinamika

politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat Melayu sejak masa kesultanan, kolonialisme Belanda, hingga berakhirnya sistem kerajaan akibat Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946. Oleh karena itu, pelestarian Istana Kota Bahrn tidak dapat dipahami semata-mata sebagai upaya mempertahankan bangunan tua, melainkan sebagai usaha menjaga memori kolektif dan identitas sejarah masyarakat yang terkandung di dalamnya.

Dalam perspektif pelestarian warisan budaya, UNESCO menegaskan bahwa warisan budaya merupakan sumber identitas, pengetahuan, dan keberlanjutan peradaban yang harus dilindungi untuk kepentingan generasi sekarang dan masa depan. Nilai penting suatu bangunan bersejarah tidak hanya ditentukan oleh usia atau bentuk arsitekturnya, tetapi juga oleh makna historis, sosial, budaya, dan simbolik yang melekat pada bangunan tersebut. Dengan demikian, Istana Kota Bahrn memiliki nilai signifikansi budaya (*cultural significance*) karena menjadi saksi perkembangan Kesultanan Kota Pinang sekaligus simbol identitas masyarakat Melayu di Labuhanbatu Selatan.

Secara yuridis, upaya pelestarian Istana Kota Bahrn memperoleh landasan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menyatakan bahwa cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi melalui kegiatan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, Istana Kota Bahrn memenuhi karakteristik sebagai objek yang memiliki nilai historis dan budaya sehingga layak memperoleh perlindungan sebagai cagar budaya. Penetapan status cagar budaya akan memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, menyusun kebijakan konservasi, serta mencegah kerusakan atau perubahan yang menghilangkan nilai keaslian bangunan.

Pelestarian Istana Kota Bahrn memerlukan strategi konservasi yang tidak hanya berorientasi pada rehabilitasi fisik bangunan, tetapi juga memperhatikan prinsip keaslian (*authenticity*) dan integritas (*integrity*). Selain itu, inventarisasi arsip, foto lama, naskah kerajaan, silsilah kesultanan, serta sejarah lisan dari keturunan sultan dan tokoh adat menjadi bagian penting dalam menjaga nilai historis yang tidak selalu tercermin pada bangunan fisik (Kiswinarso&Hanif: 2016). Konsep *heritage tourism* menempatkan situs sejarah sebagai media edukasi yang mampu memperkenalkan sejarah lokal kepada masyarakat sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi daerah. Pengembangan wisata sejarah harus dilakukan secara terencana melalui penyediaan pusat informasi sejarah, museum mini, ruang pameran koleksi Kesultanan Kota Pinang, jalur interpretasi (*interpretive trail*), papan informasi dwibahasa, serta program edukasi bagi pelajar dan mahasiswa. Dengan pendekatan tersebut, Istana Kota Bahrn tidak hanya menjadi objek kunjungan wisata, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran sejarah lokal yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian warisan budaya.

Berdasarkan uraian tersebut, pelestarian Istana Kota Bahrn merupakan upaya strategis untuk menjaga keberlanjutan identitas sejarah dan budaya masyarakat Labuhanbatu Selatan. Nilai penting istana tidak hanya terletak pada keberadaan bangunan sebagai peninggalan arsitektur Kesultanan Kota Pinang, tetapi juga pada kemampuannya merepresentasikan perjalanan sejarah masyarakat Melayu dari masa kerajaan, kolonialisme, hingga Indonesia modern. Oleh karena itu, pelestarian Istana Kota Bahrn harus dipahami sebagai proses terpadu yang mengintegrasikan konservasi fisik, perlindungan nilai sejarah, pemberdayaan masyarakat adat, serta pemanfaatan sebagai pusat pendidikan dan wisata sejarah yang berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya

menjaga keberadaan istana sebagai warisan budaya, tetapi juga memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan identitas budaya dan pengembangan pariwisata sejarah di Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

CONCLUSION

Istana Kota Bahrn merupakan warisan sejarah yang memiliki keterkaitan erat dengan perkembangan Kesultanan Kota Pinang di Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Pembangunan istana sekitar tahun 1934 pada masa pemerintahan Sultan Tengku Mustafa atau Sultan Tengku Makmur Perkasa Alamsyah tidak hanya bertujuan sebagai kediaman resmi sultan, tetapi juga sebagai pusat pemerintahan, administrasi, hukum adat, serta simbol legitimasi kekuasaan Kesultanan Kota Pinang. Pembangunan istana merupakan bentuk adaptasi kesultanan terhadap perubahan politik dan administrasi pada masa kolonial Hindia Belanda, ketika intervensi pemerintah kolonial melalui kontrak politik, *Korte Verklaring*, dan pembentukan birokrasi kolonial mulai membatasi kedaulatan kerajaan. Seiring berkembangnya pemerintahan kolonial hingga terjadinya Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946, fungsi politik Istana Kota Bahrn mengalami kemunduran. Namun demikian, istana tetap memiliki nilai historis, budaya, dan identitas yang penting sebagai bukti keberadaan Kesultanan Kota Pinang dan perkembangan masyarakat Melayu di Labuhanbatu Selatan. Oleh karena itu, pelestarian Istana Kota Bahrn perlu dilakukan melalui konservasi bangunan, perlindungan sebagai cagar budaya, serta pemanfaatannya sebagai pusat edukasi dan wisata sejarah. Upaya tersebut diharapkan mampu menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sejarah lokal sebagai bagian dari sejarah nasional.

REFERENCES

- Andaya, Barbara Watson. 2016. *Hidup Bersaudara: Suamtera Tenggara pada Awal Abad ke-17-18 M*. Yogyakarta:

- Penerbit Ombak.
- Chairi, E. (2019). Teori legitimasi kekuasaan tradisional Max Weber dan relevansinya dalam sistem pemerintahan tradisional. *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(2), 101–114.
- Harahap, B. H. (2005). *Revolusi Sosial di Sumatera Timur*. Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Kiswinarso, K., & Hanif, M. (2016). Kebijakan pelestarian cagar budaya sebagai upaya mempertahankan nilai sejarah dan kearifan lokal. *Jurnal Agastya*, 6(2), 137–154.
- Kuntowijoyo. (2013). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Tiara Wacana.
- Masri Nst, R. A. (2024). Struktur pemerintahan Kesultanan Kota Pinang dalam perspektif sejarah lokal. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 13(1), 55–71.
- Reid, A. (2011). *Menuju Sejarah Sumatra: Antara Indonesia dan Dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sinar, T. L. (2008). *Kesultanan-Kesultanan Melayu di Sumatera Timur*. Medan: Forkala.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. (2010). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130Kuntowijoyo, D. R. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Bentang Pustaka.
- Lee, E. S. (1966). A theory of migration. *Demography*, 3(1), 47–57. <https://doi.org/10.2307/2060063>
- Leiden University Libraries. (±1895). *Port in Deli, East Coast of Sumatra* (KITLV 28898). Southeast Asian & Caribbean Images Collection.
- Leiden University Libraries. (±1900). *Coolies at Work on a Tobacco Plantation of the Amsterdam Deli Company in Medan, Sumatra* (KITLV 78320). Southeast Asian & Caribbean Images Collection.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. (No Title).
- Stoler, A. L. (1995). *Capitalism and confrontation in Sumatra's plantation belt, 1870-1979*. University of Michigan Press.
- Vertovec, S. (2009). *Transnationalism*. Routledge.